

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ravianto (2014:11) Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Gibson et.al (2013:46) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif. Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan, hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda

2.1.2 Aspek Aspek Efektivitas

Syamsuddin (2018) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2007) yang di rangkum oleh Jibril (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini

- a. Ketepatan Sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- c. Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.1.3 Pengukuran Efektivitas Pelatihan

Pengukuran efektivitas program training sendiri bisa dilakukan dalam empat langkah. Empat langkah pengukuran efektivitas training ini merupakan sebuah metode pengukuran yang dikemukakan Sullivan, seorang peneliti dari San Francisco University.

Sullivan mengemukakan empat dasar dalam mengukur efektivitas pelatihan, yaitu:

1. Penilaian kinerja karyawan pra training

Sebuah pengukuran yang valid tentu saja membutuhkan adanya perbandingan. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui apakah sebuah program training berhasil atau tidak tanpa adanya data – data yang valid mengenai progres kinerja karyawan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian kerja sebelum dilaksanakan training. Fase ini bisa disebut sebagai fase awal sebelum perusahaan mulai mengukur efektivitas pelatihan. Dari data awal yang ditemukan, perusahaan nantinya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan serta program training apa yang paling sesuai dengan karyawan. Fase pertama ini tidak fokus pada penyelesaian masalah serta mengatasi kelemahan – kelemahan karyawan namun lebih fokus pada pengumpulan data awal semata.

2. Monitoring pelaksanaan program *training*

Fase kedua dalam metode penilaian efektivitas training adalah monitoring atau pengawasan pelaksanaan program training. Di fase ini perusahaan akan melaksanakan pengawasan dan penelitian mengenai pelaksanaan training. Di tahap yang satu ini perusahaan harus menilai keterlibatan karyawan dalam proses pelaksanaan training. Dari pengamatan ini akan bisa diketahui apakah program training yang sedang dilaksanakan bisa dimengerti dengan baik oleh karyawan atau tidak, apakah karyawan mengikuti program *training* dengan antusias atau tidak, keaktifan karyawan selama proses training berlangsung, serta mengetahui kemampuan karyawan sebelum dan sesudah training apakah mengalami peningkatan atau tidak.

3. Monitoring efektivitas pelatihan

Dalam prakteknya, peserta training dalam hal ini adalah karyawan perusahaan biasanya memiliki tingkat kemampuan, intelegensi, serta tingkat motivasi yang berbeda satu sama lain. Dalam sebuah pelaksanaan training, tidak semua karyawan akan langsung bisa mempraktekkan materi training yang baru saja

didapat. Diprediksi akan ada tenggang waktu tertentu antara perubahan yang diharapkan oleh perusahaan dengan waktu berakhirnya masa training. Semakin pendek tenggang waktu antara keduanya, maka perubahan positif akan semakin cepat terjadi.

4. Pencatatan dilembar penilaian

Mencatat hasil kinerja karyawan setelah pelaksanaan training sangat penting untuk mengukur efektivitas pelatihan. Di fase ini akan bisa diketahui peningkatan hasil kinerja yang sudah dicapai oleh karyawan dari sebelum pelaksanaan training dan setelah pelaksanaan training. Lembar penilaian ini nantinya akan dikomunikasikan secara terbuka melalui pertemuan khusus atau rapat terbuka dengan semua karyawan yang telah menjalani proses training. Dari rapat evaluasi ini akan diketahui masalah – masalah apa saja yang terjadi selama proses training, masalah praktek hasil training di lapangan, serta berbagai macam kesulitan yang dialami oleh karyawan selama mempraktekkan hasil training.

2.1.4 Indikator Efektivitas Program Pelatihan

Dessler (2014) mengatakan bahwa efektivitas pelatihan adalah tingkat keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan dalam mencapai tujuan, baik tujuan yang berkaitan dengan peserta maupun organisasinya. Pendekatan evaluasi pelatihan yang paling populer adalah model dari Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006). Pada tahun 2016, James dan Wendy merevisi dan mengklarifikasi teori aslinya, dan memperkenalkan "Model Kirkpatrick Dunia Baru" dalam buku mereka, "Empat Tingkat Evaluasi Pelatihan." Salah satu tambahan utama adalah penekanan pada pentingnya membuat pelatihan yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari masyarakat. Empat indikator tersebut adalah:

1. *Reaction* (Reaksi), merupakan ukuran efektivitas pelatihan yang dilihat dari reaksi para peserta pelatihan, terutama reaksi yang bersifat langsung. Dengan menggunakan questioner, pada akhir pelatihan, para peserta ditanya tentang sejauh mana mereka puas terhadap pelatihan secara keseluruhan, terhadap

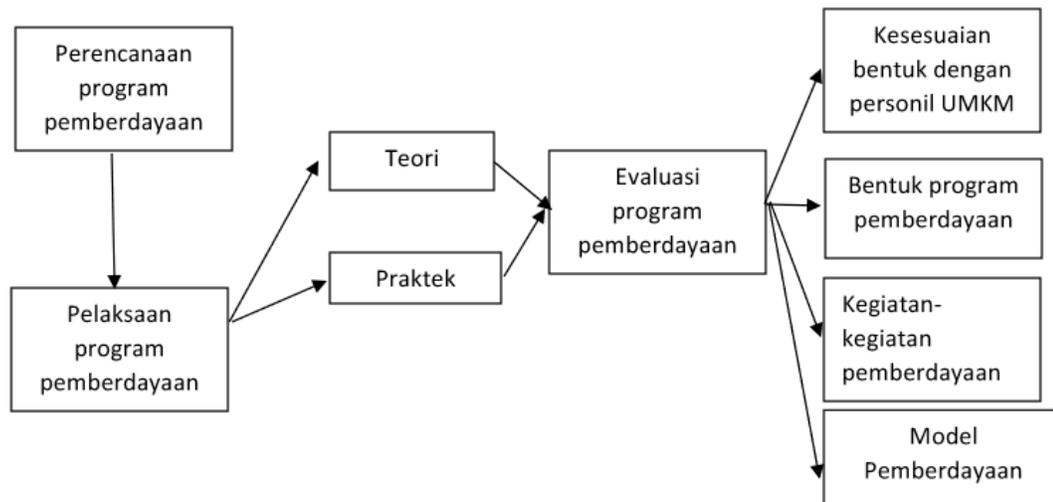
pelatih/instruktur, materi yang disampaikan, isinya, bahan-bahan yang disediakan dan lingkungan pelatihan (ruangan, waktu istirahat, makanan, suhu udara).

2. *Learning* (Pembelajaran), berhubungan dengan pengukuran peningkatan kompetensi peserta, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan diadakannya pelatihan
3. *Behavior* (Perilaku), berupa dampak dari perilaku adanya perubahan sikap dari sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan.
4. *Results* (Hasil/Dampak), sebuah hasil akhir yang terjadi sebagai akibat peserta mengikuti program pelatihan

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:113), Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Model program pendampingan dari hasil penelitian (Lathifah, 2019) Sutarto et al. (2018) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Alur Program Pemberdayaan Masyarakat

2.1.6. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan- tindakan yang semakin membaik
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat
5. Perbaikan usaha (*better business*) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
8. Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

2.1.7. Prinsip Pemberdayaan

Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Menurut Aswas (2014: 58-60), dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Hamid (2018) menyatakan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan
2. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
3. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
4. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.

5. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.
6. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun
7. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi.
8. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain.
9. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan).

2.1.8. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hamid (2018) menyatakan dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal- hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi:
 - (a) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya;
 - (b) persiapan penyelenggaraan pertemuan;
 - (c) pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;
 - (d) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
 - (a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;
 - (b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik;
 - (c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;
 - (d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan;
4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Imron (2012) menurutnya terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya:

- a. Adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif.
- b. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif.
- c. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

2.1.9. UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Kedua, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Ketiga, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Remmang (2021) mengatakan UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis berdasarkan banyaknya jumlah pekerja, yaitu: 1. Usaha Mikro memiliki jumlah karyawan 10 orang; 2. Usaha Kecil memiliki jumlah karyawan 30 orang); dan Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan hingga 300 orang.

2.1.10. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.11. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM Selama Pandemi

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan (2021) mengatakan ada 5 permasalahan yang dihadapi UMKM selama masa pandemic:

1. Turunnya daya beli masyarakat yang membuat UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tidak adanya pelanggan.
2. Adanya hambatan distribusi yang disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas. Hal ini pun membuat para UMKM Sulit untuk mendistribusikan barang yang dipesan atau dibeli konsumen.
3. Sulitnya UMKM mengakses permodalan dan pembiayaan lantaran banyaknya UMKM yang belum *bankable*.
4. Sulitnya UMKM mendapatkan bahan baku.
5. Terhambatnya produksi karena adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja.

2.1.12. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Sarfiah, et al. (2019) peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi:

- UMKM berperan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi.
- UMKM berperan sebagai penyerapan lapangan kerja terbesar,
- UMKM berperan sebagai pemeran penting untuk mengembangkan perekonomian lokal serta berperan sebagai pemberdayaan masyarakat.
- UMKM berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber inovasi dan pencipta pasar baru.

- UMKM berperan sebagai pilar perekonomian bangsa dan berkontribusi terhadap neraca pembayaran.

2.1.13. Klasifikasi UMKM

UMKM di Indonesia dapat di golongan dalam 4 kriteria (Wijoyo et al., 2020:144- 145)., yaitu:

- Kegiatan mata pencarian, yaitu UMKM dijadikan sebagai peluang untuk mencari nafkah sektor informal yang biasa dikenal sebagai pedagang kaki lima.
- Usaha mikro, yaitu UMKM memiliki sifat pengrajin namun belum memiliki jiwa kewirausahaan.
- Perusahaan kecil yang dinamis, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menjalankan usaha subkontrak dan melakukan kegiatan ekspor.
- Usaha yang bergerak cepat, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki peluang untuk menjadi usaha besar

2.1.14. Ciri - Ciri UMKM

UMKM tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari usaha besar. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari UMKM (Wijoyo et al., 2020:145-146).:

- Jenis barang yang dijual tidak tetap, artinya sewaktu-waktu dapat berubah.
- Tingkat SDM cenderung rendah. Dan jiwa kewirausahaan SDM belum mumpuni.
- UMKM biasanya belum menerapkan administrasi, kerap menggabungkan uang usaha dengan uang milik pribadi.
- Biasanya belum memiliki surat ijin usaha, legalitas ataupun NPWP.
- Tempat untuk menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah

2.2. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Anshar (2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Warga Jalan Purwo Perintis Kecamatan Medan, dan untuk mengetahui dampak kegiatan PKK terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi warga Jalan Purwo Perintis Medan. Metode dalam hal ini Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan survey langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Perintis Desa, Kecamatan Medan Timur berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat selain itu dengan adanya program PKK dapat menambah pengetahuan masyarakat dan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menyangkut sepuluh program, namun dalam penelitian ini fokus pada pemberdayaan di bidang ekonomi.

Penelitian ke dua dilakukan oleh Nufus dkk (2017). Fokus penelitian menggunakan teori pendekatan kualitatif yaitu melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandung dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada sembilan responden yang dijadikan sampel dari usaha jenis jasa, dokumentasi terkait dengan masalah dalam penelitian dan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan usaha sudah sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Bandung yaitu, edukasi karakteristik UMKM syariah, branding produk, pembukuan keuangan, pembukaan rekening tabungan syariah, bantuan akses pembiayaan, advokasi perizinan usaha, dan peningkatan omzet serta jumlah pelanggan. Sedangkan Kesejahteraan pelaku usaha dalam program pendampingan usaha memiliki nilai rata-rata 54,8% artinya pelaku usaha masuk di antara kategori keluarga sejahtera tahap I dengan keluarga sejahtera tahap II. Efektivitas program pendampingan usaha yang dilakukan Bank Indonesia Bandung dalam peningkatan kesejahteraan kurang

efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada responden yang mengatakan bahwa tidak adanya kenaikan tingkat kesejahteraan setelah program pendampingan.

Penelitian ke tiga dilakukan oleh Lasmiatun (2017), membuktikan bahwa melalui literasi keuangan baik di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kondisi pemberdayaan UKM bisa berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan dan perkembangan usaha mereka meningkat. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam secara langsung pada tineliti. Hasil penelitian ini yaitu Peran Literasi Keuangan dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara ke Bu Ana (Pengusaha kerudung) Ia menyatakan: “Setelah saya mengetahui manfaat literasi ini, keuangan keluarga lebih terstruktur dengan baik Bu, karena sudah banyak pelanggan meskipun tempat usaha ini masih kontrak. Awalnya saya membuka usaha mendapatkan pinjaman dari koperasi BMT Rizki Prima Sebesar Rp. 10.000.000 untuk usaha kerudung ini Bu, hasil tiap minggu selain saya gunakan untuk membayar karyawan juga saya sisakan pendapatan usaha saya untuk mengangsur, bahkan saat ini kehidupan rumah tangga saya berkecukupan untuk pembayaran sekolah dan terpenuhi kebutuhan sehari hari.”

Penelitian ke empat dilakukan oleh Sulistyorini menyatakan bahwa pada umumnya para wanita mendirikan suatu usaha berdasarkan pada alasan ekonomi bukan pada keinginan untuk menciptakan sesuatu yang unik dan diminati oleh pasar. Hal ini memerangkap mereka untuk menciptakan produk yang selalu sama dari waktu ke waktu, sehingga pasar mengalami kejenuhan dan usaha merkapun gulung tikar. Ketika ekonomi rumah tangga dijadikan oleh para wanita sebagai alasan pendirian usaha mereka, maka tanpa disadari mereka menghalangi tumbuhnya kewirausahaan dalam usaha mereka, yang menjadi landasan tumbuh kembangnya usaha melalui penciptaan produk inovatif yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena kewirausahaan merupakan manifestasi kemampuan dan kemauan individual, untuk menciptakan peluang baru, melalui penciptaan produk baru. Faktor penentu keberhasilan pembangunan kewirausahaan wanita yang berdampak pada inovasi produk adalah modal sosial. Dapat dikatakan bahwa modal sosial

merupakan sumberdaya aktual dan potensial yang dihubungkan dengan kepemilikan jejaring hubungan (*structural social capital*) yang terdapat trust (*relational social capital*), dan keiklasan untuk berbagi visi (*cognitive social capital*) atau hubungan yang saling menguntungkan bagi para wirausaha wanita

Penelitian ke lima dilakukan oleh Agustim (2017). Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai UMKM yang terdapat di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang mempunyai karakteristik yang baik sebagai daerah penyangga bagi lingkungan perkotaan di sekelilingnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas dari pelaku UMKM di Desa Donowarih masih menggunakan manajemen sederhana dalam pengelolaan usahanya. Banyak faktor yang berpengaruh dalam hal ini: pendidikan, mental, lingkungan dan faktor yang lain. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perbaikan dan peningkatan program-program yang dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dan hal terpenting yang lain adalah pemerintah secara langsung dapat menentukan program-program pembangunan yang selaras dengan keadaan karakteristik suatu daerah.

Penelitian ke enam dilakukan oleh Ita dkk (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM pada Kecamatan Sungai Sembilan di Kota Dumai dan menganalisis Dampak Program Pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian UMKM Wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Yang menjadi Subjek Penelitian diatas adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Pendamping UMKM Kecamatan Sungai Sembilan, Pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sungai Sembilan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu pemerintahan kecamatan Sungai Sembilan akan mengadakan sertifikasi halal yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021 yang tentunya proses ini gerakan berlangsung melalui pelatihan sosialisasi serta pembinaan terlebih dahulu yang nantinya akan diadakan tahap-tahap penilaian terhadap produk dari pelaku usaha atau

mencapai standarisasi sertifikasi halal oleh BPOM. bahkan untuk saat ini pemerintahan kecamatan Sungai sembilan bekerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga tertentu dalam membantu penjualan produk dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ke tujuh dilakukan oleh Dinantika et.al (2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mengingat tujuan dari penelitian adalah menggali lebih dalam data di lapangan sehingga metode kualitatif adalah pilihan yang tepat. Teori penelitian dilandasi dari teori efektivitas. Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang diinginkan yaitu apabila suatu hasil atau output kegiatan semakin mendekati sasaran, maka artinya semakin tinggi efektivitasnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posdaya Bacang, Srengseng Sawah sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta dinilai mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa output dari Program Posdaya Bacang yaitu masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait program, menjalankan program demi program berdasarkan kesepakatan bersama, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan kewirausahaan serta kegiatan simpan pinjam.

Penelitian ke delapan dilakukan oleh Doni (2020). Tujuan penelitian ini adalah memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, serta homepage untuk mengakses data dan informasi terkini berkaitan dengan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka

panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia

Penelitian ke sembilan dilakukan oleh Gorahe, Waani, & Tasik (2021). Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dampak Covid 19 terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan berfokus pada teori Brudeseth menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain: kesejahteraan materi; kesejahteraan bermasyarakat; kesejahteraan emosi dan keamanan. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah Penelitian Lapangan, studi kepustakaan dan penelusuran data online. Informan yang digunakan adalah informan yang mengetahui pasti mengenai pokok bahasan yang dibahas serta menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa Dampak pandemic covid 19 bagi kesejahteraan materi masyarakat desa Dalako Bembanehe sangat terasa bagi masyarakat menengah kebawah hal tersebut diakibatkan karena berkurangnya pendapatan masyarakat. Pandemi Covid 19 juga berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat atau kehidupan social bermasyarakat desa, hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan social dan juga pembatasan kegiatan social dan kemasyarakatan. Kesejahteraan Emosi turut dipengaruhi oleh covid 19 di desa Dalako Bembanehe, hal tersebut terlihat bahwa pengaruhnya ada pada lingkungan keluarga dimana berkurangnya pendapatan sehingga menimbulkan perselisihan di dalam keluarga.

Penelitian ke sepuluh dilakukan oleh Adrian (2018). Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan nilai ekspor dan meningkatkan pemberdayaan produk-produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, melakukan analisis hanya sampai pada tataran deskriptif, yaitu menganalisis dan

menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa membuktikan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekspor cukup tinggi namun masih di bawah jumlah ekspor nonmigas yang dihasilkan oleh usaha besar. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi umkm untuk mampu bersaing di masa yang akan datang.

